

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pengimplementasian Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan awal mula dari era otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Diterapkannya otonomi daerah merupakan wujud dari pemberian kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah lebih leluasa dalam mengelola sumber daya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pemerintah daerah harus menjadi lebih mandiri sehingga mengurangi ketergantungannya kepada pemerintahan pusat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan sosial masyarakat. Untuk mengukur kemampuan pemerintahan suatu daerah tersebut perlu ditetapkan acuan atau standar bahwa kapan suatu daerah bisa dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel sehingga diperlukan suatu kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur penetapan kebijakan keuangan untuk tahun anggaran selanjutnya.

Salah satu cara untuk menilai kinerja pemerintah adalah dengan melakukan analisis terhadap kinerja keuangan yang dikelola oleh pemerintah tersebut. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya membutuhkan personel yang handal, tetapi juga kemampuan keuangan daerah yang memadai. Oleh karena itu, daerah dengan kinerja keuangan yang baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerahnya (Sularso & Restianto, 2011).

Pengukuran kinerja keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode pelaporan tertentu. Salah satu metode yang efektif mengukur kinerja keuangan adalah dengan menggunakan rasio keuangan daerah terhadap laporan realisasi anggaran pemerintah daerah yang terdiri dari derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi belanja dan rasio keserasian.

Setelah dilakukannya pengukuran kinerja keuangan, maka dapat terlihat apakah pengambilan keputusan sudah tepat atau belum, selain itu juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja yang telah dihasilkan yang kemudian dapat menentukan tindakan apa yang seharusnya diterapkan untuk memperbaiki kinerja periode selanjutnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan di Kab.Tanah Datar menggunakan metode analisis rasio keuangan

terhadap laporan realisasi anggaran dengan mengangkat judul “**Analisis Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab.Tanah Datar Tahun 2016-2020**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kab.Tanah Datar tahun 2016-2020 dengan menggunakan alat ukur derajat desentralisasi?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kab.Tanah Datar tahun 2016-2020 dengan menggunakan alat ukur rasio ketergantungan keuangan daerah?
3. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kab.Tanah Datar tahun 2016-2020 dengan menggunakan alat ukur rasio kemandirian daerah?
4. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kab.Tanah Datar tahun 2016-2020 dengan menggunakan alat ukur rasio efektivitas pendapatan asli daerah?
5. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kab.Tanah Datar tahun 2016-2020 dengan menggunakan alat ukur rasio efisiensi belanja daerah?
6. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kab.Tanah Datar tahun 2016-2020 dengan menggunakan alat ukur rasio keserasian?

## 1.3 Tujuan

Tujuan penulisan tugas akhir mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kab.Tanah Datar yaitu:

1. Menguraikan kinerja keuangan pemerintah daerah Kab.Tanah Datar tahun 2016-2020 dengan menggunakan alat ukur derajat desentralisasi.
2. Menguraikan kinerja keuangan pemerintah daerah Kab.Tanah Datar tahun 2016-2020 dengan menggunakan alat ukur rasio ketergantungan keuangan daerah.
3. Menguraikan kinerja keuangan pemerintah daerah Kab.Tanah Datar tahun 2016-2020 dengan menggunakan alat ukur rasio kemandirian daerah.
4. Menguraikan kinerja keuangan pemerintah daerah Kab.Tanah Datar tahun 2016-2020 dengan menggunakan alat ukur rasio efektivitas pendapatan asli daerah.
5. Menguraikan kinerja keuangan pemerintah daerah Kab.Tanah Datar tahun 2016-2020 dengan menggunakan alat ukur rasio efisiensi belanja.
6. Menguraikan kinerja keuangan pemerintah daerah Kab.Tanah Datar tahun 2016-2020 dengan menggunakan alat ukur rasio keserasian.

## 1.4 Manfaat

Dengan adanya laporan tugas akhir ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Penulis  
Dapat menambah wawasan penulis mengenai rasio-rasio yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu penulisan laporan



akhir ini juga merupakan sarana yang baik bagi penulis untuk mempraktekkan pengetahuan dan teori yang diperoleh di perkuliahan.

2. Bagi Pembaca  
Dapat menambah wawasan pembaca terkait analisis kinerja keuangan pemerintah daerah serta dapat dijadikan referensi dan acuan untuk mengadakan praktek lapangan di masa yang akan datang.
3. Bagi Sekolah Vokasi  
Dapat memberikan manfaat dalam bidang pengetahuan terutama terkait analisis laporan keuangan dan juga sebagai bahan referensi bagi Mahasiswa/i untuk penulisan laporan tugas akhir berikutnya.
4. Bagi Instansi  
Dapat mengevaluasi hasil kinerja dari pemerintah daerah berdasarkan analisis dan perhitungan rasio, sehingga penulisan laporan akhir ini dapat dijadikan acuan untuk menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi dalam perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah di masa yang akan datang.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies